

Menerima Siswa Baru  
Tahun Ajaran 2021 / 2022

**LIVE** OFFLINE/ONLINE  
STREAMING - INTERAKTIF

SIAP KBM TATAP MUKA  
STANDAR PROTOKOL KESEHATAN  
SEMUA PENGAJAR DAN KARYAWAN  
SUDAH DI VAKSIN

## SIAP LEBIH DINI NAIK KELAS MASUK NEUTRON YOGYAKARTA

BIMBINGAN MULAI : **16, 22, 26, 30 JUNI 2021**



www.neutron.co.id

## KEJARI TEMANGGUNG LAKUKAN PENAHANAN Pimca PD BKK Diduga Korupsi Rp 400 Juta

TEMANGGUNG (KR) - Pimpinan Cabang (Pimca) PD BKK Pringsurat Cabang Tretep Sugeng Prayitno (SP) ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Rp 400 juta dan langsung ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Temanggung.

Kasi Pidus Kejaksaan Negeri Temanggung Agung Nugroho mengatakan, setelah melalui serangkaian pemeriksaan dan penyidikan Kejari Temanggung akhirnya menetapkan Sugeng Prayitno sebagai tersangka kasus korupsi. "Tersangka langsung kami tahan untuk 20 hari kedepan dan dititipkan di Tahanan Polres Temanggung," kata Agung, Kamis (17/6).

Ia mengatakan, tersangka diduga telah menyalahgunakan wewenangnya di lembaga keuangan milik Pemprov Jateng dan Pemkab Temanggung hingga merugikan negara Rp 405.772.283. Kasus ini menjadi perhatian masyarakat luas, karena merugikan ribuan nasabah yang hingga saat ini tabungannya maupun depositonya belum bisa diambil.

laskan, tersangka selaku Pimca PD BKK Pringsurat Cabang Tretep tahun 2012 sampai dengan 2017 terbukti melakukan penyalahgunaan keuangan. Modusnya, kredit fiktif, tabungan minus dan kas bon kasir.

"Berdasarkan laporan hasil audit Inspektorat Kabupaten Temanggung No 700-900/007.PKN/2020



Tersangka kasus korupsi PD BKK Pringsurat Cabang Tretep, ditahan Kejaksaan Negeri Temanggung.

tanggal 25 Juni 2020 akibat perbuatan tersangka SP telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 405.772.283. Kami masih terus mendalami kasus ini," paparnya.

Ia mengatakan, tersangka dijerat Primair Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UURI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah UURI No 20 Tahun 2001 Tentang PTPK (Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UURI No 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah UURI No 20 Tahun 2001 Tentang PTPK. Ter-

sangka terancam hukuman minimal 4 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara serta denda paling banyak Rp 1 miliar.

Pihak Kejaksaan sendiri telah melakukan rangkaian panjang untuk mengungkap kasus korupsi ini. Antara lain pada Juli 2020 berhasil menyelamatkan uang negara Rp 751 juta dari kasus korupsi BKK Pringsurat. Uang tersebut merupakan hasil sitaan dari dua orang terpidana mantan Direktur Utama BKK Pringsurat Suharno dan Direktur BKK Pringsurat Riyanto.

Kasus korupsi BKK Pringsurat sendiri mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 114 miliar. Sekitar 10 ribu nasabah dirugikan dan tidak bisa mengambil uang tabungan maupun depositonya, karena korupsi yang dilakukan manajemen BKK Pringsurat sejak tahun 2009 sampai 2017.

Selain Suharno dan Riyanto, dua orang mantan pegawai BKK Pringsurat atas nama Triyono dan Rian Anggi juga sudah menjalani hukuman.

(Osy)-f



Anggota Komisi III DPR RI Drs HM Idham Samawi (kedua kiri) diapit Ketua DPRD Kulonprogo Akhid Nuryati dan Bupati Sutedjo bersiap melakukan peletakan batu pertama.

## HM IDHAM SAMAWI TURUT LETAKKAN BATU PERTAMA PP Tahfidzul Qur'an Sentolo Bangun Rusun Santri

WATES (KR) - Anggota Komisi III DPR RI Drs HM Idham Samawi mengapresiasi positif perjuangan Pengasuh Pondok Pesantren (PP) Tahfidzul Qur'an Dzirkul Qobli, AKBP (Purn) KH Imam Subarno dalam ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut sesuai alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

"Karena ini urusan mencerdaskan kehidupan bangsa, proposal yang disampaikan Pak Kiai Imam Subarno terkait permohonan pembangunan rumah susun (rusun) bagi para santri pondok pesantren langsung saya tindaklanjuti berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan peletakan batu pertama Pembangunan Rusun PP Tahfidzul Qur'an Dzirkul Qobli," kata Idham Samawi di Gedung Ngerandu Kalurahan Salamrejo Kapanewon Sentolo, Kamis (17/6).

Turut hadir di acara ini, Bupati Kulonprogo Drs H Sutedjo, Ketua DPRD setem-

pat Akhid Nuryati dan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III Muhammad Mulya Permana MT, Direktur Rumah Susun Dr Maryoko Hadi dan unsur Muspika Sentolo.

Mengingat infrastruktur ini merupakan sarana pendukung untuk mencerdaskan putra-putri bangsa, maka politisi senior PDIP asal DIY ini *wanti-wanti* betul kepada pengelola PP Tahfidzul Qur'an Dzirkul Qobli, agar dalam pembelajarannya mengedepankan tiga perkara yakni cerdas, berakhlak mulia dan berkepribadian Indonesia. "Bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin-pemimpin yang komplit dan berjiwa kesatria. Selain cerdas, pemimpin juga harus berakhlak mulia dan berkepribadian Indonesia. Dalam membekali anak-anak yang notabene calon pemimpin bangsa adalah melalui pendidikan di pondok pesantren. Karena itu fasilitas pondok harus dilengkapi salah satunya tempat tinggal atau rusun ini," ujar Idham Samawi.

(Rul)-f

## HARI INI LIVE IG TV Bincang Lomba Penulisan Desa Wisata

YOGYA (KR) - Digelarnya Lomba Penulisan Desa Wisata Joglosemar, mendapat respons dari ribuan netizen menyukai postingan pertama lomba di akun Instagram @krjogjadotcom. Untuk lebih mengetahui terkait lomba yang digelar oleh Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BOB) ini, bersama Kedaulatan Rakyat (KR) dan Sekolah Vokasi UGM, Jumat (18/6) pukul 16.00 sore ini, digelar Bincang-Bincang tentang lomba tersebut di Live Instagram @borobudur dan @krjogjadotcom. Masyarakat yang berminat ikut lomba tersebut dapat menanyakan langsung tentang lomba tersebut dan akan dijawab langsung oleh Direktur Pemasaran Pariwisata BOB, Agus Rochiyardi.

Menurut Agus, terdapat 16 desa wisata akan menyambut wisatawan ataupun penulis yang berniat mengulas dan mengenalkan lebih dekat keindahan potensi alam dan budaya. 16 desa meliputi Desa Karanganyar, Karangrejo, Borobudur dan Ngareto di Kabupaten Magelang, Desa Kaligono dan Pandanrejo di Kabupaten

Purworejo, lalu Desa Glagah, Segajih, Tinalah, Jatimulyo, Pagerharjo dan Gerbosari di Kabupaten Kulonprogo, Desa Bleberan dan Sri Getuk di Kabupaten Gunungkidul, Desa Pulesari dan Garongan di Kabupaten Sleman dan Desa Mangunan di Kabupaten Bantul. Pendaftaran peserta melalui link <http://bit.ly/karyatulisbob>.

Dijelaskan, kegiatan lomba menulis desa wisata ini bersifat terbuka, dibuat untuk mengenalkan lebih jauh tentang 16 desa wisata yang ada di kawasan Magelang, Purworejo dan Yogyakarta. Desa-desa wisata tersebut memiliki potensi luar biasa yang bisa dieksplorasi dari berbagai sudut pandang. Pendaftaran 14 Juni - 14 Juli 2021. "Lomba menulis ini kami kreasikan untuk semakin memperkenalkan potensi desa wisata tersebut di masyarakat dan juga untuk mengembangkannya menjadi desa wisata mandiri. Untuk tiap desa nantinya akan ada dua pemenang dengan hadiah jutaan Rupiah. Total hadiah sendiri mencapai lebih dari Rp 48 juta," sambung dia.

(Fxb)-d

## PIMPINAN KPK DATANGI KOMNAS HAM Jelaskan Legal Standing Pengalihan Pegawai

JAKARTA (KR) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menegaskan, lembaga tersebut tidak mangkir dari panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Namun, lebih pada masalah kepastian hukum.

"Salah satu kepastian hukum itu adalah kejelasan tentang keterangan apa yang dibutuhkan kepada KPK," kata Nurul Ghufron di Kantor Komnas HAM Jakarta, Kamis (17/6) usai menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus tes wawasan kebangsaan (TWK).

Hal tersebut mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyebutkan, asas-asas yang perlu diperhatikan salah satunya mengenai kepastian hukum. Oleh sebab itu, lanjutnya, pada Selasa (15/6) KPK mengutus Biro Hukum dan Kepala Bagian Litigasi mempertanyakan apa saja keterangan yang dibutuhkan Komnas HAM.

Kehadiran Ghufron ke Komnas HAM untuk menjelaskan beberapa hal, di antaranya mengenai landasan hukum hingga legal standing

KPK menyusun kebijakan pengalihan pegawai menjadi aparat sipil negara (ASN).

Mulai dari tindak lanjut Pasal 5 Ayat (6) PP No 41 Tahun 2020 yang memandatkan kepada KPK menyusun Peraturan Komisi (Perkom) tentang Pengalihan Status Pegawai KPK menjadi ASN. Setelah itu, lahirlah Perkom No 1 Tahun 2021 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN. "Itu mengenai kebijakan regulasinya," kata Ghufron.

Untuk pelaksanaan, KPK bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) berdasarkan Perkom No 1 Tahun 2021 Pasal 5 Ayat (4) yang mengatur pelaksanaan tes wawasan kebangsaan dilaksanakan KPK bekerja sama dengan BKN. Selanjutnya, untuk pelaksanaan dimulai pada bulan Maret 2021 hingga pengangkatan pegawai menjadi ASN pada 1 Juni 2021.

"Jadi, kami menjelaskan legal standing, dasar hukum kewenangan, kemudian kebijakan regulasi dan pelaksanaan alih pegawai KPK jadi ASN," katanya.

Pada bagian lain Ghufron mengatakan, KPK menjamin dan memas-

akan transparan terkait kuisir tes wawasan kebangsaan (TWK) selama hal itu masih menjadi wewenang lembaga antirasuah tersebut. "Selama itu kewenang dan dilaksanakan oleh KPK, KPK akan transparan," kata Nurul Ghufron.

Hal itu mulai dari pembuatan peraturan komisi sampai bagaimana KPK bekerja sama dengan BKN untuk melaksanakan TWK. Namun, terkait metode, materi dan hasil TWK, otoritas tersebut berada pada BKN untuk membuka atau tidak.

Ia juga menegaskan, lembaga antirasuah tersebut tidak memiliki kompetensi untuk menilai apakah hasil TWK bisa dibuka atau tidak kepada publik karena merupakan ranah BKN. Terkait TWK yang menjadi polemik tersebut, Ghufron mengaku KPK sedang diadukan beberapa pihak ke sejumlah institusi. Termasuk pula uji materi UU No 19 tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, juga peraturan komisi No 1 tahun 2021 saat ini juga sedang diuji materi di MK. "Kami juga sedang dilaporkan ke Ombudsman dan Komnas HAM," ujarnya.

(Ful)-f

## 11 Anggota DPR Terpapar Covid-19

JAKARTA (KR) - Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan, berdasarkan data yang diterimanya hingga saat ini tercatat sebanyak 11 anggota DPR dan banyak staf pendukung terpapar Covid-19, sehingga dilakukan pengetatan masuk Kompleks Parlemen. Ia mengakui karena adanya lonjakan kasus Covid-19, beberapa komisi di DPR seperti Komisi I dan Komisi VIII melakukan penundaan rapat-rapat, karena ada anggota DPR, ASN, tenaga ahli dan petugas kebersihan yang terpapar.

"Data hingga hari ini (kemarin) yang terpapar, tenaga ahli ada 11 orang, PPN terdiri Pengamanan Dalam (Pamdal) dan TV Parlemen ada 7 orang, PNS 17 orang, dan anggota DPR ada 11 orang," ujar Indra, Kamis (17/6).

Pihaknya akan melakukan pengetatan, khususnya terkait kehadiran fisik dalam rapat-rapat di komisi dan akan diputuskan dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

"Salah satu wacana yang disampaikan, misalnya, apakah nanti ke depan hanya dihadiri Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan selebihnya melalui vir-

tual. Memperketat semua rapat untuk memastikan semuanya sesuai protokol kesehatan," jelasnya.

Indra menjelaskan, untuk ASN DPR RI sudah diambil keputusan yaitu kehadiran dibatasi 75 persen bekerja dari rumah atau WFH. Sementara itu, menurut Indra, untuk anggota DPR, akan diputuskan dalam Rapat Bamus dan wacananya kehadiran fisik dalam rapat hanya dihadiri pimpinan rapat, sedangkan anggota hadir secara virtual.

"Tinggal nanti pola kerjanya yang akan diputuskan Pimpinan DPR dalam Rapat Bamus. Pengaturannya adalah mengangkut memperketat semua rapat atau sidang untuk memastikan semuanya sesuai prokes," ujarnya.

Ia juga menjelaskan, akses ke Kompleks Parlemen juga akan diperketat mulai dari gerbang pintu masuk, seperti pemeriksaan suhu tubuh, penerapan prokes, hingga ditanyakan keperluannya hadir di Gedung Parlemen.

Langkah itu, memang akan tidak nyaman, namun harus dilakukan pengetatan untuk tujuan kesehatan dan keselamatan semua pihak.

(Ant)-f

## GUNAKAN PASPOR PALSU MASUK SINGAPURA Buronan Adelin Lis Kembali Ditangkap

JAKARTA (KR) - Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura bergerak cepat untuk memulangkan buronan kelas kakap Adelin Lis dari Singapura ke Jakarta. Tim Kejagung di Singapura sudah *standby* untuk pemulangan Adelin Lis. "Jaksa Agung meminta Adelin Lis segera dibawa ke Jakarta, tidak boleh ke tempat lain," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (17/6).

Leonard membenarkan informasi penangkapan Adelin Lis, Buronan ini menggunakan paspor palsu atas nama Hendro Leonardi pada Maret 2021 ketika memasuki Singapura.

Sejak mendapatkan berita tersebut, kata Leonard, Kejagung langsung bergerak cepat bersama KBRI melobi Pemerintah Singapura agar mendeportasi Adelin Lis yang pernah dua kali melarikan diri. "Jaksa Agung Burhanuddin menolak keinginan Adelin Lis, karena penegekan hukum merupakan kewenangan mutlak Kejagung. Burhanudin memerintahkan KBRI untuk hanya mengizinkan Adelin Lis dideportasi ke Jakarta," kata Leonard.



Adelin Lis

KR-Antara

Adelin Lis merupakan buronan sejak 2008 dan bahkan masuk dalam daftar *red notice* Interpol, Jaksa Agung berniat untuk menjemput langsung Adelin Lis oleh aparat penegak hukum Indonesia dari Singapura.

Pengalaman 2006 ketika Adelin Lis hendak ditangkap di KBRI Beijing, ia bersama pengawalnya melakukan perlawanan dan memukul Staf KBRI Beijing, kemudian melarikan diri. KBRI Singapura sudah melakukan koordinasi dengan Jaksa Agung Singapura untuk menyampaikan keinginan Jaksa Agung RI. Data tentang kejahatan yang dilakukan Adelin Lis sudah disampaikan ke Kejaksaan Agung Singapura.

Jaksa Agung Singapura sangat memahami kasus ini, tetapi wewenang untuk repatriasi ada di ICA (Imigrasi Singapura), Kementerian Dalam Negeri (Ministry of Home Affairs) Singapura. Leonard menyebutkan, KBRI secara resmi sudah menyampaikan keinginan penegak hukum Indonesia bagi diizinkan penjemputan khusus kepada buronan kelas kakap ini.

Namun, pihak Kementerian Luar Negeri Singapura pada 16 Juni 2021 tidak memberikan izin untuk penjemputan secara langsung.

(Ant)-f